

“WHAT JOB CAN YOU GET WITHOUT A DIPLOMA?”: GENDER DISCRIMINATION AGAINST RELAPSED EX-SEX WORKERS

Resna Anggria Putri¹
Johanna Debora Imelda²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai subordinasi dan marginalisasi yang dihadapi oleh mantan pekerja seksual komersial (PSK) di Kabupaten Indramayu. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara intensif terhadap 5 (lima) studi kasus menarik di mana data yang terkumpul ditriangulasi dengan beberapa informan kunci lainnya untuk menjaga validitas dan realibilitas data. Hasil penelitian menunjukkan adanya gender discrimination dalam bentuk sub-ordinasi dan marginalisasi di bidang pendidikan dan pekerjaan pada kurun waktu yang berbeda, sebelum dan sesudah mereka terjerumus dan bekerja sebagai PSK, yang kemudian menyebabkan mereka terpaksa kembali bekerja sebagai PSK tanpa ada pilihan lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih normatif.

ABSTRACT

This study aims at describing the subordination and marginalization of ex-commercial sex workers in Indramayu District. This qualitative research was conducted through in-depth interview and observation on 5 (five) interesting case studies whose data, then, was triangulated to ensure the validity and reliability of the data. The results of the study showed that there were gender discrimination in the form of subordination and marginalization in education and employment which are applied at different periods, i.e.: before and after they worked as prostitutes. Hence, it is then caused them relapse working as prostitutes without any other opportunity to get more normative jobs.

KEY WORDS: *Marginalization, commercial sex workers, women, prostitution, subordination.*

1 Alumni Program Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia

2 Staf Pengajar Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia

PENDAHULUAN

Dengan jumlah yang hampir separuh dari total penduduk, peran perempuan dalam pembangunan bangsa Indonesia sangat besar dan merupakan aset bangsa yang potensial dan kontributor yang signifikan dalam pembangunan bangsa sebagai agen perubahan (Jajuli, 2012). Sayangnya, posisi mereka tidak menguntungkan karena tingginya angka perempuan yang mengalami kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik Republik Indonesia pada tahun 2008 dalam Curumur (2009, hal. 138) menunjukkan bahwa 70% dari jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 34,96 juta jiwa adalah perempuan. Apalagi kenyataannya mereka yang bekerja pun kebanyakan masih ditempatkan di posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan rekan lelaki mereka. Sari (2005) menyatakan bahwa sejumlah 89,25% tenaga kerja perempuan di Indonesia bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah.

Selain pekerjaan, rendahnya pendidikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan perempuan Indonesia menjadi miskin. Data yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (2010) menunjukkan sebesar 9,20% perempuan dari penduduk di Indonesia yang berusia di atas sepuluh tahun mengalami buta huruf pada tahun 2009 dan 8,47% pada tahun 2010. Sedangkan, data yang sama menunjukkan bahwa laki-laki yang mengalami buta huruf hanya 3,88% pada tahun 2009 dan 4,19% pada tahun 2010. Selain itu, sebanyak 9,41% perempuan berusia sepuluh tahun ke atas tidak atau belum pernah sekolah pada tahun 2009 (Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2009-2010). Data tersebut pun memperlihatkan bahwa hanya 3,84% laki-laki yang tidak atau belum pernah sekolah pada tahun 2009. Hal itu merupakan bukti bahwa pendidik-

an perempuan di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Budaya patriarki yang berkembang di dalam masyarakat menumbuhkan gender discrimination yang menempatkan kaum perempuan pada posisi subordinat (subordinasi), termarginal (marginalisasi), dan terdiskriminasi (diskriminasi) menyebabkan perempuan dianggap lebih rentan mengalami kemiskinan dibandingkan laki-laki (Arjani 2007, hal. 10; Moghadam, 2005, hal.2-7).

Faktor-faktor tersebut menyebabkan banyak perempuan yang tidak memiliki human capital yang cukup untuk hidup layak; tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang cukup untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang memadai; terpaksa terjerumus dalam pekerjaan yang tidak normatif seperti menjadi pekerja seks komersial (PSK). PSK yang biasanya merujuk pada pelacur perempuan adalah perempuan yang menggunakan atau menjajakan tubuhnya untuk memperoleh keuntungan berupa uang atau barang (Soedjono, 1977, hal. 17). Menurut studi yang dilakukan oleh International Labour Organization (1998, hal. 47) terhadap 50 PSK di Indramayu, sebanyak 46% PSK terjun ke dunia prostitusi karena kemiskinan (faktor ekonomi), 28% di antara mereka terjun ke dunia prostitusi karena rendahnya pendidikan, serta sebanyak 26% disebabkan karena faktor sosial dan budaya. Hingga saat ini, belum ada informasi yang pasti mengenai jumlah PSK di Indonesia karena banyaknya PSK yang tidak terdata. Namun, berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan pada tahun 2012, jumlah PSK di Indonesia tergolong tinggi, yaitu diperkirakan mencapai 230.000 orang (Febrida, 2012). Selain itu, data United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 2003 pun menunjukkan bahwa di

Indonesia terdapat 190.000-270.000 pekerja seks komersial yang sebagian besar merupakan perempuan dalam usia produktif (Supriadi, 2008).

Permasalahannya adalah perempuan yang bekerja sebagai PSK rentan mengalami kekerasan, baik secara verbal, psikis, maupun fisik, dan juga rentan tertular penyakit menular seksual. Aditya (2012) menyatakan bahwa PSK sering kali mengalami kekerasan yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja dan pelanggan, seperti pemukulan, ni-lai transaksi yang tidak disepakati, hingga ancaman. Lebih jauh, Aditya menganggap bahwa PSK harus menerima stigma negatif dan sanksi sosial yang diberikan masyarakat kepada mereka. Selain rentan mengalami kekerasan, PSK pun rentan terjangkit HIV/AIDS. Data yang diperoleh *Cirebon News* dari wawancara dengan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Cirebon, sebanyak 68% dari mereka mengidap penyakit tersebut. Bahkan, menurutnya, PSK menduduki tingkatan tertinggi dalam penularan HIV/AIDS (*Cirebon News*, 2011).

Yang sangat mengejutkan adalah bahwa tidak sedikit mantan PSK yang kembali terjun ke dunia prostitusi. Data menunjukkan bahwa sekitar 80% mantan PSK yang berasal dari beberapa wilayah di Jawa Barat yang dimasukkan ke Badan Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) di Cirebon untuk diberikan pembinaan dan pelatihan selalu kembali menjajakan diri karena berbagai alasan (Setianingsih, 2011). Menurut Heyzer (1986, hal. 62), banyaknya perempuan yang kembali menjadi PSK, disebabkan karena adanya pendekatan tradisional di mana perempuan-perempuan tersebut dianggap hanya bisa melakukan pekerjaan di ranah domestik, seperti pembantu rumah tangga.

Padahal, pada saat melakukan pekerjaan tersebut, mereka mendapatkan upah yang rendah, perlindungan yang minim, pekerjaan yang melelahkan; berjam-jam dan hampir tidak ada hari libur; serta sering diperlakukan kasar dan buruk. Akhirnya, mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai PSK di panti pijat atau klub malam.

Penelitian ini dilakukan di Indramayu, khususnya Kabupaten Indramayu, yang terkenal sebagai salah satu pemasok pekerja seks komersial di Indonesia. Berdasarkan studi yang dilakukan di Kramat Tunggak, lebih dari separuh pekerja seks komersial yang bekerja di sana berasal dari Indramayu. Letak geografis sebagian daerah Kabupaten Indramayu yang dilalui jalur yang dikenal sebagai Jalur Pantura (Pantai Utara) turut mempengaruhi tingginya prostitusi di daerah tersebut. Selain itu, masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, perjodohan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya di usia muda, dan tingginya angka perceraian banyak terjadi di Kabupaten Indramayu. Penelitian lapangan yang dilakukan pada tahun 1991 dan 1994 di Indramayu memperlihatkan bahwa perempuan yang bercerai lebih rentan untuk terjun ke dunia prostitusi (International Labour Organization, 1998, hal. 47-49). Selain itu, selama peneliti melakukan penelitian, terlihat bahwa terdapat nilai-nilai yang cenderung patriarkis dalam masyarakat di Kabupaten Indramayu. Kebanyakan, perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anak di rumah. Sedangkan, laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, bekerja di luar rumah.

Artikel ini akan membahas bagaimana gender discrimination dalam bentuk subordinasi dan marginalisasi, terutama di bidang pendidikan dan pekerjaan, dihadapi oleh mantan PSK dalam kehidupan mereka

membuat mereka terpaksa kembali bekerja sebagai PSK. Diskriminasi tersebut dialami dan disosialisasikan jauh sebelum mereka terjerumus dalam dunia prostitusi dan bahkan menjerat mereka sedemikian rupa sehingga menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih normative sehingga terpaksa harus kembali menjerumuskan diri di pekerjaan yang sama sebagai PSK.

METODE

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana peneliti harus menjadi instrumen utama dalam penelitian di mana peneliti mengumpulkan sendiri data melalui interaksi langsung terhadap informan dengan menggunakan pandangan-pandangan menyeluruh (holistik) yang subjektif dan beragam terhadap situasi yang dihadapi PSK.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Stake dalam Creswell (2010, hal. 20) menganggap bahwa "studi kasus menekankan pada eksplorasi proses atau aktivitas-aktivitas yang terjadi secara spesifik pada lembaga, kelompok, atau individu tertentu". Lebih jauh, Yin (1989) menekankan bahwa penggunaan multi sumber bukti merupakan salah satu prinsip penting pengumpulan data dalam studi kasus. Studi kasus dipilih mengingat peneliti ingin menitikberatkan penelitian ini pada identifikasi bagaimana gender discrimination yang secara spesifik terjadi pada kelompok tertentu, yaitu pekerja seks komersial. Oleh karena itu, penggunaan strategi ini pun akan menentukan pertanyaan penelitian yang diajukan. Karena studi kasus bertujuan untuk melihat proses, maka pertanyaan penelitian berawal dari pertanyaan "bagaimana". Alas-

an lain peneliti menggunakan studi kasus adalah peneliti akan menggunakan lebih dari satu informan yang merupakan pekerja seks komersial dalam usia produktif dan memperhatikan sumber-sumber bukti lainnya, seperti keluarga atau teman dekat informan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Creswell (2010, hal. 266-270) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumen kualitatif, dan materi audio visual. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa fokus penelitian ini merupakan masalah yang cukup sensitif di Indonesia karena masih terdapat stigma negatif terhadap PSK dalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti harus mempertimbangkan secara matang teknik yang akan digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini. Peneliti haruslah menghargai para partisipan dan tempat yang akan diteliti karena banyak masalah etis yang mungkin muncul selama tahap pengumpulan data.

Teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, yaitu melihat perilaku dan aktivitas partisipan di lokasi penelitian, kemudian mencatatnya. Observasi tersebut dilakukan sebelum dan pada saat penelitian. Observasi yang dilakukan sebelum penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi serta permasalahan yang berada di lokasi penelitian. Sedangkan, observasi yang dilakukan pada saat penelitian dilakukan bersamaan dengan wawancara mendalam dan triangulasi.

Selain observasi, teknik lain yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Menurut peneliti, dalam penelitian ini, teknik yang paling cocok digunakan untuk memperoleh

gambaran mengenai gender discrimination yang terjadi pada PSK dalam usia produktif ialah wawancara mendalam dengan informan. Melalui wawancara secara langsung, peneliti mendapatkan data mengenai cara pandang, perasaan, dan persepsi PSK dalam usia produktif yang menggambarkan gender discrimination yang terjadi pada mereka secara mendalam.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di salah satu kecamatan di Kabupaten Indramayu. Dalam preliminary observation terlihat bahwa terdapat nilai-nilai yang cenderung patriarkis dalam masyarakat di Kabupaten Indramayu. Kebanyakan, perempuan bekerja sebagai ibu rumah tangga dan mengasuh anak di rumah. Sedangkan, laki-laki, sebagai kepala rumah tangga, bekerja di luar rumah. Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Indramayu bukanlah kemiskinan dalam sudut pandang ekonomi saja, melainkan juga kemiskinan kultural, yakni pendekatan nilai budaya dalam memahami kemiskinan melihat bahwa kemiskinan tidak hanya dikaitkan dengan berapa banyak sumber ekonomi yang dimiliki seseorang, tetapi juga melihat mengapa seseorang gagal mencapai tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Kemiskinan kultural ini terutama dialami oleh kaum perempuan yang dalam budaya patriarki berada di posisi subordinat dan termarginal sehingga mereka kesulitan untuk keluar dari kemiskinan. Pada akhirnya, banyak dari mereka menganggap bahwa tidak memiliki kemampuan lain selain bekerja sebagai pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Hal menarik lainnya adalah adanya nilai-nilai yang paradoxical dan kontradiktif yang bisa hidup bersandingan bersama. Mayoritas

penduduk di Kabupaten Indramayu menganut agama Islam yang taat dan cenderung konservatif, yaitu sebanyak 1.676.373 orang atau 99% dari total penduduk (Laporan Data Penduduk Kabupaten Indramayu Berdasarkan Agama, 2010) yang mana telah mempengaruhi nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) wajib untuk masuk madrasah pada siang hingga sore hari selepas sekolah formal. Kemudian, biasanya mereka mengaji setelah pulang dari madrasah. Namun, menariknya, selain dianggap negatif dan tabu, prostitusi pun dianggap sebagai hal yang wajar. Warung-warung yang menyediakan jasa prostitusi mudah ditemukan di pinggir jalan besar sekali pun. Pekerjaan di dunia prostitusi secara informal sudah dianggap sebagai salah satu mata pencaharian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, beberapa orang tua bahkan meminta anak perempuannya untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

4. Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling*, yaitu teknik pemilihan informan yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi informan (Sugiyono, 2011, hal. 125). Teknik *nonprobability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sugiyono (2011, hal. 126) menganggap *purposive sampling* sebagai teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu di mana sumber data merupakan orang yang dianggap paling mengetahui informasi yang kita harapkan.

Dalam penentuan informan, dipilih orang-orang yang dianggap dapat memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial

yang akan diteliti. Seperti dalam penelitian ini, informan yang dipilih merupakan perempuan usia produktif yang kembali sebagai PSK karena mereka lah yang mengalami subordinasi dan marginalisasi sehingga dianggap mampu memberikan informasi yang mendalam untuk menggambarkan masalah tersebut. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa teknik pemilihan informan tersebut merupakan teknik yang paling tepat dilakukan dalam penelitian ini. Selain itu, untuk mendapatkan keakuratan dan kelengkapan data mengenai gender discrimination yang dihadapi oleh PSK, peneliti juga memilih informan pendukung, antara lain keluarga informan, teman/*peer group* informan, serta mucikari.

Dalam penelitian ini, relapsed ex-sex workers yang menjadi informan kunci adalah mereka yang menjadikan pekerjaan di dunia prostitusi sebagai sumber mata pencaharian utama serta tidak memiliki pekerjaan lain ketika bekerja sebagai PSK atau yang disebut juga sebagai *professional prostitute*, yakni mereka yang melakukan pelacuran sebagai sumber kehidupan, mendapatkan penghasilan hanya dari melacur, dan tidak memiliki pekerjaan lain selain itu. Sebagai profesional prostitute, mereka bisa dikategorikan sebagai *brothel prostitute*, yakni PSK yang menjajakan tubuhnya secara terorganisir di suatu tempat, yaitu di warung-warung kecil. Salah seorang dari informan kunci bahkan pernah bekerja dengan satu orang saja atau disebut sebagai *one-man prostitute*. Namun, karena hubungan mereka diketahui oleh istri pelanggannya, ia pun memutuskan untuk tidak lagi bekerja sebagai *one-man prostitute*.

Chant (2007, hal. 1) menganggap pada umumnya mayoritas masyarakat miskin di dunia adalah perempuan, ketidakseimbangan proporsi kemiskinan di mana perempuan

yang miskin jauh lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, serta terkait dengan feminisasi kepala rumah tangga, yaitu banyak perempuan yang menjadi kepala rumah tangga dewasa ini. Perempuan miskin dianggap lebih miskin dibandingkan dengan laki-laki yang juga hidup dalam kemiskinan yang menyebabkan kemiskinan menjadi identik dengan perempuan (Moghadam, 2005, hal. 2). Gimenez dalam Moghadam (2005, hal. 7) pun mengatakan bahwa kemiskinan yang terjadi pada laki-laki merupakan konsekuensi dari adanya pengangguran sehingga dapat ditanggulangi dengan memberikan pekerjaan. Akan tetapi, kemiskinan yang dihadapi oleh perempuan akan tetap terjadi walaupun perempuan bekerja dalam waktu penuh. Hal itulah yang mengakibatkan perempuan dianggap lebih rentan mengalami kemiskinan.

Menurut Arjani (2007, hal. 10), kemiskinan berkaitan dengan budaya patriarki yang berkembang di dalam masyarakat. Lebih jauh, Arjani menjelaskan bahwa hal tersebut dapat terlihat dari subordinasi atau penempatan kaum perempuan pada posisi subordinat, marginalisasi atau penempatan kaum perempuan pada posisi marginal, serta diskriminasi. Penelitian ini mengangkat gender discrimination sebagai konsep utama dan melihat subordinasi dan marginalisasi sebagai dua subkonsep yang menyebabkan terjadinya discrimination terhadap perempuan.

Penempatan kaum perempuan pada posisi subordinat disebut sebagai subordinasi. KP3A Republik Indonesia (2010) mendefinisikan subordinasi sebagai "suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain." Subordinasi terhadap perempuan tersebut dapat terlihat dari beberapa aspek, yaitu: 1.) banyaknya kegiatan dan ciri-

-ciri kaum perempuan yang dianggap kurang penting, lemah, kurang berharga, dibandingkan dengan kegiatan dan ciri-ciri kaum pria (Bemmelen, 1995, hal. 183); 2.) perempuan memiliki otoritas yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki karena adanya anggapan bahwa perempuan hanya dapat mengurus hal-hal dalam arena rumah tangga (domestik) saja di saat laki-laki dianggap memiliki kapabilitas dalam arena publik (Ridjal, Margani, & Husein, 1993, hal. 33-34). Konsep subordinasi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada subordinasi dalam bidang pendidikan dan pekerjaan; di mana konsep subordinasi di bidang pendidikan dibatasi pada tidak adanya pemberian prioritas bagi anak perempuan untuk bersekolah dalam keluarga; serta adanya anggapan bahwa pendidikan kurang penting bagi perempuan. Sedangkan, subordinasi di bidang pekerjaan dapat terlihat dari adanya anggapan bahwa perempuan hanya dapat bekerja di ranah domestik saja.

Menurut Dejardin & Awad (1995, hal. 10), marginalisasi terhadap perempuan tersebut dapat terlihat dari: 1.) Adanya anggapan bahwa tanggung jawab domestik dan reproduktif perempuan sebagai merupakan fungsi utama mereka; 2.) perempuan menghadapi hambatan dalam mengakses jasa dan sumber daya produktif; 3.) perempuan dianggap sebagai pencari nafkah sekunder, sedangkan laki-laki dianggap pencari nafkah utama; 4) pekerjaan perempuan cenderung kurang dihargai. Dalam penelitian ini, konsep marginalisasi yang digunakan adalah marginalisasi dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Marginalisasi di bidang pendidikan dapat terlihat dari adanya hambatan bagi perempuan dalam mengakses pendidikan yang ditunjukkan dengan tidak diberikannya kesempatan untuk bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan,

marginalisasi di bidang pekerjaan dapat ditunjukkan dengan pekerjaan perempuan yang cenderung kurang dihargai, baik secara sosial maupun ekonomi, dan adanya anggapan bahwa perempuan merupakan pencari nafkah sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Subordinasi yang Dihadapi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa subordinasi yang dihadapi ex-relapsed sex workers, yang menjadi informan dalam penelitian ini, bukan hanya subordinasi di bidang pendidikan, tetapi juga subordinasi di bidang pekerjaan. subordinasi yang menyebabkan mereka kembali bekerja sebagai PSK tidak hanya terlihat ketika mereka memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai PSK, tetapi juga subordinasi sudah terjadi jauh sebelum mereka terjerumus dalam pekerjaan sebagai SW dan telah tersosialisasi sejak dulu di lingkungan keluarga dan juga teman sebaya (*peer group*). Subordinasi ini terjadi ketika prioritas untuk bersekolah diberikan lebih kepada anak laki-laki di dalam keluarga dibandingkan dengan anak perempuan. Apalagi kemudian adanya anggapan bahwa pendidikan bagi perempuan kurang penting. Sementara itu, subordinasi di bidang pekerjaan terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga teman sebaya hanya terjadi ketika mereka berhenti menjadi pekerja seks komersial; dan bukan subordinasi yang sudah tersosialisasi sejak lama.

1.1. Subordinasi di Bidang Pendidikan

Dalam penelitian ini, subordinasi di bidang pendidikan ditemukan pada beberapa kasus, yaitu kasus yang dialami Bunga, Indri, dan Mona. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bunga, diketahui bahwa orang tuanya

menganggap bahwa pendidikan tidak begitu penting bagi perempuan. Anak perempuan dalam keluarganya memang diprioritaskan untuk menikah muda, bahkan dijodohkan. Kakak pertama Bunga dipaksa untuk menikah pada usia 17 tahun. Lalu, pada saat kakak pertama Bunga melahirkan anak pertama, kakaknya yang kedua pun dijodohkan setelah tiga tahun lulus dari sekolah dasar. Namun, anak laki-laki dalam keluarganya diperbolehkan untuk sekolah hingga tingkat lanjut walaupun hanya sampai tingkat SMP. Hal tersebut pun diakui oleh Bapak T1 yang merupakan kakak sepupu Bunga. Menurutnya, adik laki-laki Bunga memang disekolahkan hingga tingkat SMP dengan alasan bahwa anak laki-laki harus bekerja.

"...ya gara-gara orang tua anggepnya sekolah gak penting kan sekarang mau kerja apa pun harus sekolah dulu.. Mau cari kerja harus sekolah lanjut dulu.. Harus ada ijazah. Makanya saya bingung, gak ada yang nafkahn, sekarang jadi kerjanya begitu...sekarang mau kerja apa pun kan sekarang pake ijazah, Mbak, Mau perempuan mau laki. Ya, kayak saya lah seusia saya terus gak punya ijazah gitu kan ujung-ujungnya jadi kayak gitu lagi. Gak ada lagi kan.. Terus ada apa itu.. uang muka sekarang mah kerja tuh.." (Bunga, 2 Maret 2013)

Sama seperti yang dialami Bunga, Mona pun merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan yang layak ketika berhenti menjadi PSK. Hal tersebut disebabkan karena ia tidak memiliki pendidikan yang memadai untuk mencari pekerjaan. Orang tua Mona menyekolahkan adik laki-lakinya (anak kedua) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan,

ia dan adik perempuannya hanya disekolahkan sampai bangku Sekolah Dasar (SD).

"...itu yang bikin aku bingung mau kerja apa pas berhenti sama Mama.. Terus gimana caranya aku bisa tetep hidupin anak, ade-ade.. Mending balik lagi.. kembali lagi sama Mama.. Mau kerja apa Dek kalo Cuma tamatan SD.. kan dianggepnya ng-gak apa.. nggak sanggup. Dulu mau pro-tes sama orang tua juga.. kan mereka yang cari duit. Mau diapain lagi.." (Mona, 30 Maret 2013)

Berbeda dengan Bunga dan Mona, Indri mengaku bahwa ia telah terpengaruh dengan teman-temannya. Sebagian besar teman-temannya menganggap bahwa pendidikan bagi perempuan itu kurang penting karena nantinya perempuan tidak perlu bekerja dan akan dibiayai oleh suami. Artinya, perempuan dianggap tergantung dengan laki-laki yang dianggap lebih 'superior' dibandingkan perempuan. Hal serupa pun diakui oleh T3 yang merupakan salah satu teman yang mempengaruhi Indri. Menurutnya, ia dan teman-temannya, termasuk Indri, sempat berpikir bahwa pendidikan tidak begitu penting bagi perempuan. Mereka beranggapan bahwa mereka tidak perlu bekerja karena hanya tinggal menikah dan mengurus anak saja sehingga tidak perlu bersekolah hingga lanjut. Ternyata, pemikiran teman-teman Indri tersebut telah mempengaruhi Indri. Indri menuturkan bahwa ia menjadi malas untuk bersekolah dan menganggap bahwa pendidikan memang tidak penting untuk perempuan.

"...temen-temen kita (saya) semuanya dulu bilang perempuan nggak usah sekolah, nggak usah kerja.. Kan nanti cari aja suami yang berduit.. Hahahaha... kita kepengaruh itu omongan temen.. Kerasanya

sekarang.. Besarin anak-anak ya kita sendiri. Untunglah bisa makanin anak, gak kayak orang-orang. Biar anak cepet besar bagaimana, orang nggak punya suami ya bagaimana. Orang disakitin suami. Ya, kan anak harus makan, harus minum. Nggak bisa kerja lain; nggak bisa baca tulis. Kita jual diri lagi aja.. kita sih juang yang gampang-gampang aja.. demi anak..” (Indri, 16 Maret 2013)

Perlakuan yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan dalam keluarga Bunga dan Mona, menurut Ridjal, Margani, & Hu-sein, merupakan salah satu bentuk subordinasi terhadap perempuan di mana perempuan memiliki otoritas yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Dalam dua kasus ini, ditemukan bahwa otoritas tersebut merupakan otoritas dalam hal pendidikan. Anak laki-laki dalam keluarga Bunga dan Mona lebih diberi prioritas untuk bersekolah. Sedangkan, anak perempuan kurang diberikan kesempatan untuk bersekolah hingga lanjut. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan memiliki otoritas yang lebih sedikit dalam hal pendidikan dibandingkan laki-laki sehingga pendidikan mereka menjadi rendah.

Pada kasus Bunga, rendahnya pendidikan menyebabkan ia tidak percaya diri untuk mencari pekerjaan yang layak ketika ia berhenti menjadi pekerja seks komersial sehingga memilih untuk diam saja di rumah. Padahal, ia memiliki anak yang harus dibiayai setelah bercerai dengan mantan suaminya. Ia tidak ingin terus-menerus membebani anak pertamanya serta anak kakaknya yang pertama dan kedua yang membiayainya ketika ia berhenti menjadi PSK. Ia pun ingin dapat hidup secara mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Karena merasa tidak bisa mencari pekerjaan yang layak akibat subordi-

nasi di bidang pendidikan yang sudah tersosialisasi sejak lama dalam keluarga tersebut, ia pun memutuskan untuk kembali terjun ke dunia prostitusi setelah sempat berhenti selama satu tahun.

Seperti yang terjadi pada Bunga, pada kasus Mona, rendahnya pendidikan akibat subordinasi di bidang pendidikan dalam keluarga juga membuatnya tidak percaya diri untuk mencari pekerjaan lain. Akan tetapi, berbeda dengan Bunga, ia sempat memiliki pekerjaan ketika berhenti menjadi PSK, yaitu menjadi buruh tani. Namun, ia merasa pekerjaannya tersebut kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Padahal, setelah bercerai dengan mantan suaminya, Mona harus membiayai kehidupan anak hasil pernikahannya dengan mantan suaminya tersebut. Selain itu, ia pun harus membiayai ibu dan adik-adiknya. Akhirnya, karena merasa tidak ada jalan lain, ia pun terpaksa kembali bekerja sebagai PSK.

Subordinasi dalam bidang pendidikan juga dialami oleh Indri. Berbeda dengan Bunga dan Mona, Indri mengalami subordinasi dalam lingkungan *peer group*. Hal itu terlihat dari adanya anggapan dari teman-temannya bahwa perempuan tidak perlu bersekolah karena nantinya akan ikut suami dan mengurus rumah tangga. Mengacu pada Ridjal, Margani, & Husein, anggapan tersebut merupakan salah satu bentuk subordinasi yakni perempuan dianggap hanya bisa mengurus ranah domestik (rumah tangga) sehingga tidak perlu bersekolah. Walaupun kasus yang dialami Indri tidak terkait dengan pemberian prioritas untuk bersekolah seperti yang terjadi pada kasus Bunga dan Mona, tetapi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa anggapan teman-temannya tersebut ternyata sangat mempengaruhi pemikiran Indri. Ia pun menganggap bahwa pendidikan

memang kurang penting bagi perempuan dan menjadi malas untuk bersekolah.

Namun, setelah bercerai karena sering kali disakiti oleh mantan suaminya, Indri sangat menyesali hal tersebut. Ia baru merasakan pentingnya pendidikan setelah ia berjuang menjadi tulang punggung keluarga. Anggapan yang membuatnya malas untuk bersekolah hingga lanjut tersebut ternyata membuatnya mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Pada saat berhenti, Indri memang sempat bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun, ia merasa tidak nyaman dengan pekerjaan tersebut. Ia mengaku bahwa ia tidak bisa mencari pekerjaan yang lebih layak karena tidak bisa membaca dan menulis. Seperti yang terjadi pada kasus yang dialami Bunga dan Indri, subordinasi yang sudah tersosialisasi sejak lama dalam *peer group* tersebut membuat Indri tidak memiliki pendidikan yang memadai. Hal itu menyebabkan ia kesulitan mencari pekerjaan yang layak di saat ia harus membesarkan kedua anaknya sendirian setelah bercerai dengan suaminya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk kembali bekerja sebagai pekerja seks komersial.

Dari analisis yang telah dijabarkan, jelas terlihat bahwa subordinasi di bidang pendidikan yang terjadi pada Bunga, Indri, dan Mona merupakan subordinasi yang sudah tersosialisasi jauh sebelum mereka menjadi pekerja seks komersial. Subordinasi di bidang pendidikan yang terjadi pada Bunga dan Mona merupakan subordinasi yang sudah tersosialisasi sejak dulu di dalam lingkungan keluarga yang terlihat dari tidak adanya prioritas bagi anak perempuan untuk bersekolah hingga lanjut. Sedangkan, subordinasi di bidang pendidikan yang terjadi pada Indri adalah subordinasi yang tersosialisasi di dalam lingkungan teman sebaya (*peer group*)

yang terlihat dari adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah. Subordinasi yang sudah tersosialisasi sejak lama tersebut ternyata mempengaruhi mereka untuk kembali bekerja sebagai PSK.

1.2. Subordinasi di Bidang Pekerjaan Dalam penelitian ini, subordinasi di bidang pekerjaan ditemukan pada kasus Ratu, Mona, dan Dita. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ratu, selain karena keinginannya sendiri, ternyata orang tuanya pun memintanya untuk kembali bekerja di warung. Orang tuanya menganggap bahwa jika Ratu melamar pekerjaan lain, belum tentu ia akan diterima karena ia merupakan perempuan.

"...ya kan kita jujur, kita balik juga selain karena kitanya sendiri, selain karena kitanya pengen ya.. disuruh juga sama orang tua kita.. Kan katanya daripada kerja-kerja capek, ngelamar kerja sana-sini, kan belum tentu juga bisa. Namanya perempuan kan.. Susah. Mendingan kerja begini aja lagi.." (Ratu, 29 Maret 2013)

Begitu pula dengan yang dialami Mona, keputusannya untuk kembali terjun ke dunia prostitusi salah satunya dipengaruhi oleh teman sesama PSK yang bekerja di warung. Teman-temannya membujuk Mona agar kembali bekerja karena menurut mereka, perempuan sulit mencari kerja. Apalagi, jika tidak bersekolah hingga lanjut dan memiliki ijazah seperti Mona. Akhirnya, ia terpengaruh dengan ucapan teman-temannya tersebut. Ia pun merasa bahwa perempuan memang tidak memiliki potensi apa pun yang dapat menjanjikan selain bekerja sebagai PSK.

"...iya, katanya 'udahlah.. kita kan cewe.. cewe mah bisa apalagi kan, mana seko-

lah nggak lanjut.. Mending ngejablay lagi aja..’ Hahaha..” (Mona, 30 Maret 2013).

Hal serupa dialami Dita. Ia menuturkan bahwa ibu kandungnya lah yang memintanya untuk kembali terjun ke dunia prostitusi. Ia pun mengungkapkan bahwa sebenarnya ibunya menginginkan ia menikah lagi agar ia dapat dibiayai oleh suaminya kelak. Namun, ia sendiri belum siap untuk kembali menjalin hubungan dengan laki-laki setelah suaminya meninggal dunia. Oleh karena itu, ibunya memintanya untuk kembali bekerja di wa-rung agar tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga.

“...Ibu bilangnya udahlah susah mau kerja apa gitu.. ya ibu saya tau saya kerja kaya gitu.. katanya saya harusnya kawin aja biar dibiayain suami.. tapi gimana.. saya gak berani buat nikah lagi, belum siap.. kata Ibu.. ya udahlah kerja di ‘warung’ lagi aja, udah susah mau kerja apa juga..” (Dita, 8 April 2013)

Mengacu pada Ridjal, Margani, & Hussein, subordinasi di bidang pekerjaan salah satunya dapat terlihat dari adanya anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kapabilitas untuk bekerja di ranah publik dan hanya dapat mengurus hal-hal dalam arena rumah tangga (domestik) saja, seperti yang dialami oleh Ratu, Mona, dan Dita pada saat mereka berhenti menjadi pekerja seks komersial.

Pada kasus Ratu dan Mona, tampak bahwa mereka dianggap akan sulit mencari pekerjaan lain karena identitas mereka sebagai perempuan. Anggapan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa perempuan dianggap hanya bisa mengurus hal-hal dalam ranah domestik saja sehingga akan sulit untuk mencari pekerjaan. Akhirnya, orang tua Ratu dan teman-teman Mona sesama PSK mepenga-

ruhi mereka untuk kembali bekerja di dunia prostitusi. Hal itu menyebabkan mereka terpaksa kembali bekerja sebagai PSK.

Sedangkan, pada kasus Dita, subordinasi di bidang pekerjaan dapat terlihat dari adanya anggapan bahwa perempuan tergantung dengan laki-laki secara ekonomi. Ibu kandung Dita memintanya untuk menikah lagi agar dapat dinafkahi oleh suami. Akan tetapi, karena Dita belum siap untuk kembali menjalin hubungan, ibu kandungnya justru memintanya untuk kembali bekerja sebagai PSK. Anggapan ini sebenarnya pun menunjukkan bahwa perempuan dianggap tidak memiliki kapabilitas untuk bekerja di ranah publik sehingga harus tergantung dengan laki-laki yang dianggap ‘lebih mampu’ bekerja. Pada akhirnya, hal tersebut menyebabkan Dita kembali bekerja di dunia prostitusi.

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan, jelas terlihat bahwa subordinasi di bidang pekerjaan yang terjadi pada Ratu, Mona, dan Dita hanya terjadi ketika mereka berhenti menjadi pekerja seks komersial, bukan subordinasi yang sudah tersosialisasi sejak lama. Subordinasi di bidang pekerjaan yang dialami Ratu dan Dita terjadi di lingkungan keluarga yang terlihat dari adanya anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kapabilitas untuk bekerja di ranah publik sehingga akan sulit mencari pekerjaan. Sedangkan, subordinasi di bidang pekerjaan yang dihadapi Mona terjadi di dalam lingkungan *peer group* (teman sesama PSK) yang juga terlihat dari adanya anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kapabilitas untuk bekerja di ranah publik.

1.3. Marginalisasi yang Dihadapi

Marginalisasi di bidang pendidikan terlihat dari adanya hambatan dalam mengakses pendidikan, yakni mereka tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah hingga jen-

jang yang lebih tinggi oleh orang tua mereka. Marginalisasi di bidang pendidikan yang terjadi dalam keluarga tersebut ternyata sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial. Sedangkan, marginalisasi di bidang pekerjaan terjadi ketika mereka berhenti menjadi PSK dan memiliki pekerjaan lain. Marginalisasi di bidang pekerjaan tersebut terlihat dari pekerjaan perempuan yang kurang dihargai, baik secara sosial maupun ekonomi, serta adanya anggapan bahwa perempuan merupakan pencari nafkah sekunder. Berdasarkan temuan tersebut diketahui bahwa marginalisasi menyebabkan mereka kembali bekerja sebagai PSK tidak hanya dapat dilihat ketika mereka berhenti saja, tetapi juga marginalisasi yang sudah terjadi sejak dulu.

1.4. Marginalisasi di Bidang Pendidikan

Dalam penelitian ini, marginalisasi di bidang pendidikan ditemukan pada dua kasus, yaitu Bunga dan Mona. Marginalisasi di bidang pendidikan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga. Menurut pengakuan Bunga dan Mona, kedua orang tuanya tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Sebagai anak perempuan, Bunga dan Mona dianggap tidak perlu bersekolah karena nantinya akan menikah dan dibiayai oleh suami. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bunga dan Mona memiliki hambatan dalam mengakses pendidikan karena tidak memiliki kesempatan untuk bersekolah.

"...saya sih pengen sekolah lanjut.. pengen punya ijazah. Tapi nggak boleh sama orang tua, nggak boleh sampe lanjut.. Suruhnya nikah aja.." (Bunga, 15 Maret 2013)

"...dulu cuma ade yang laki yang disekolahkan sampe SMA, kalo yang lain ya sama.. SD aja.. Kan mikirnya entar juga ujung-ujungnya kan kita (anak perempuan) mah dinikahin orang, ikut orang.." (Mona, 30 Maret 2013)

Menurut Dejardin & Awad, adanya hambatan dalam mengakses pendidikan membuat perempuan menjadi terpinggirkan. Hambatan tersebut sebenarnya merupakan dampak dari adanya anggapan bahwa tanggung jawab reproduktif dan domestik merupakan fungsi utama perempuan, seperti yang dialami oleh Bunga dan Mona. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut, terlihat bahwa orang tua mereka menganggap bahwa mereka harus mengurus hal-hal di ranah domestik saja sehingga tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah. Bahkan, orang tua Bunga justru meminta Bunga untuk menikah muda. Hal itu menyebabkan mereka akhirnya merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dan memutuskan untuk kembali bekerja di dunia prostitusi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat bahwa marginalisasi di bidang pendidikan yang dialami oleh Bunga dan Mona dalam keluarga sudah terjadi sejak lama, bukan ketika mereka berhenti menjadi PSK. Marginalisasi di bidang pendidikan tersebut terlihat dari adanya hambatan bagi perempuan untuk mengakses pendidikan yang ditunjukkan dengan tidak diberikannya kesempatan bagi informan untuk bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Hal itu menyebabkan lemahnya *human capital* yang pada akhirnya membuat mereka tidak percaya diri untuk mencari pekerjaan yang layak. Mereka pun memutuskan untuk kembali bekerja sebagai PSK karena menganggap bahwa mereka tidak memiliki kemampuan lain.

1.5. Marginalisasi di Bidang Pekerjaan

Dalam penelitian ini, marginalisasi di bidang pekerjaan ditemukan pada beberapa kasus, yaitu Indri, Ratu, Mona, serta Dita. Menurut penuturan Indri, setelah menikah pada tahun 1998, Indri memutuskan untuk berhenti menjadi PSK. Pada saat itu, ia pun bekerja sebagai pembantu rumah tangga, masih di salah satu daerah di Kabupaten Indramayu. Akan tetapi, pada saat bekerja sebagai pembantu, ia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari majikannya berupa kekerasan secara verbal. Ia mengaku sering dibentak oleh majikannya. Terlebih lagi, penghasilannya sebagai pembantu dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal yang serupa dijelaskan oleh Ibu T2 yang merupakan ibu kandung Indri. Menurut Ibu T2, Indri memang tidak betah bekerja sebagai pembantu. Ia menuturkan bahwa pendapatan yang dihasilkan Indri sangat sedikit, yaitu Rp. 30.000 per hari. Padahal, anak perempuannya itu hanya bekerja tiga kali dalam seminggu. Artinya, dalam sebulan, ia mendapatkan penghasilan sebanyak Rp. 360.000.

“...kan kita mending jual diri lagi aja.. Bisa dapet uang cukup, nggak dimarah--marahin, ada pergaulan juga.. Orang janda, nggak punya suami, yang penting bisa makanin anak, bisa biaya anak sekolah. Kan anak kan mau sekolah, mau ini, kalo kita gak kerja gimana anak bisa makan. Kalo kita nggak nyari ya siapa yang kasih makan..” (Indri, 16 Maret 2013)

Tak jauh berbeda dengan Indri, Ratu pun mengalami hal serupa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ratu, pada saat ia berhenti menjadi PSK, ia sempat bekerja di pabrik konveksi bahan jaket di Jakarta selama tiga

tahun. Ia pertama kali bekerja di sana pada saat ia telah bercerai dengan suaminya di tahun 2003. Namun, pada awal tahun 2006, ia memutuskan untuk berhenti bekerja di pabrik tersebut karena merasa lelah bekerja di Jakarta. Ia menganggap pendapatan yang ia hasilkan tergolong sedikit. Padahal, pekerjaannya di pabrik tersebut cukup melelahkan. Menurut penuturannya, ia bekerja tiga *shift* dalam sehari. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam. Akan tetapi, ia mendapatkan upah yang minim. Menurutnya, ia hanya digaji Rp. 1.000.000 setiap bulannya. Padahal, pekerjaan tersebut membutuhkan keterampilan dan sangat menguras tenaga. Menurut Ibu T4 yang merupakan pengelola ‘warung’ (muci-kari) tempat Ratu bekerja, Ratu memang sudah lelah bekerja di Jakarta sehingga ia memilih untuk berhenti. Selain itu, pendapatan yang Ratu hasilkan selama bekerja di pabrik konveksi dianggap kurang bisa mencukupi kebutuhan. Ia pun menuturkan bahwa Ratu mengaku merasa lebih nyaman bekerja di tempatnya.

“...karena kita tuh udah capek. Gajinya dikit, kerjanya capek. Kerjanya kan tiga *shift* sehari. Jam tujuh pagi sampe.. apa.. sampe jam tiga sore.. Sampe jam tiga sore.. Keluar.. nah terus kerja lagi, sebelas sampe jam pagi. Pokoknya tiga *shift* aja.” (Ratu, 29 Maret 2013)

“...kalo di sini kan capeknya kan kurang tidur aja.. Kalo di sana.. bukan capek lagi itu namanya. Orang tiga *shift* kan kerjanya tuh. Kita sih jujur ya mending kita di sini aja..” (Ratu, 29 Maret 2013)

“...kadang kita pengen kerja yang bener lagi, tapi kalo gaji sedikit, kita udah nggak ini.. Pernah gaji itu sebulan satu juta.

Nggak cukup itu. Lebih cukup di sini.. Emang kalo di sini dosa ya emang dosa ya, cuma ya gimana.. hahahaha." (Ratu, 29 Maret 2013)

Selain Indri dan Ratu, Dita pun pernah menghadapi hal yang sama. Pada tahun 2007, Dita memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai PSK. Sama seperti Indri, pada saat itu, Dita pun bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun, ketika bekerja sebagai pembantu, ia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari majikannya berupa kekerasan secara verbal. Bahkan ia pernah dituduh mencuri telepon genggam milik anak majikannya yang menyebabkan ia harus menerima berbagai cacian dari majikannya tersebut. Ibu T7 pun menuturkan hal yang senada. Menurutnya, majikan di tempat Dita bekerja sebagai pembantu rumah tangga memang galak. Ia pun mengakui bahwa anaknya tersebut sempat dituduh mencuri telepon genggam milik anak majikannya.

"...lebih sejahtera di sini, temen-temennya banyak, baik-baik, uangnya lebih banyak dapetnya.. Lebih baik lah daripada jadi pembantu. Kan mending saya kerja lagi aja di sini.." (Dita, 8 April 2013)

Mengacu pada Dejardin & Awad, Indri, Ratu, dan Dita telah mengalami marginalisasi atau peminggiran terhadap perempuan. Marginalisasi yang dialami mereka merupakan marginalisasi di bidang pekerjaan. Dalam kasus ini, terlihat bahwa pekerjaan yang dilakukan mereka ketika berhenti menjadi PSK yang tergolong sebagai pekerjaan di ranah domestik tersebut kurang dihargai, baik secara sosial, maupun ekonomi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga memang kegiatan yang diidentikkan sebagai pekerjaan perempuan,

seperti mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan rumah, dan memasak. Begitu pula dengan pekerjaan di pabrik konveksi bahan jaket yang dilakukan Ratu ketika berhenti menjadi PSK, yaitu menjahit dan membordir.

Namun, pekerjaan yang sebenarnya membutuhkan keterampilan dan menguras tenaga itu justru kurang dihargai, baik secara sosial, maupun ekonomi. Pekerjaan yang melelahkan tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut kurang dihargai secara ekonomi, seperti yang terjadi pada Indri dan Ratu. Selain itu, beberapa informan, yaitu Indri dan Dita kurang dihargai secara sosial, yakni mereka mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan selama bekerja. Peristiwa yang dialami mereka di mana pekerjaan atau sektor yang didominasi oleh perempuan cenderung kurang dihargai, baik secara sosial, maupun ekonomi, menurut Dejardin & Awad, menunjukkan adanya marginalisasi terhadap perempuan. Hal tersebut menyebabkan mereka lebih memilih untuk kembali menjadi PSK karena dianggap lebih bisa membuat mereka lebih sejahtera.

Berbeda dengan yang dialami Indri, Ratu, dan Dita, Mona mengalami marginalisasi bahkan ketika pekerjaan yang dilakukannya tidak identik atau didominasi oleh perempuan. Pada saat Mona memiliki suami, ia berhenti bekerja sebagai PSK dan mulai bekerja di sawah sebagai buruh tani. Awalnya, ia ingin berjualan. Akan tetapi, ia tidak memiliki modal. Pekerjaannya sebagai buruh tani tersebut diakuinya sangat melelahkan. Ia harus berangkat kerja pada pukul delapan pagi dan selesai pada pukul empat sore. Ada pun pekerjaan yang dilakukannya pada saat bertani adalah *tandur* atau menanam padi, panen

padi, menjemur padi, serta membersihkan ta-naman padi dari rumput liar atau gulma

Selain melelahkan, ternyata pendapatan yang Mona terima ketika bekerja di sawah, menurutnya, sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Hal serupa dituturkan oleh Ibu T5. Berdasarkan hasil wawancara-ra dengan Ibu T5, terlihat bahwa pekerjaan Mona sebagai buruh tani memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, menurut Mona, pendapatan yang ia terima memang berbeda dengan buruh tani laki-laki. Pada saat *tandur* (menanam padi), Mona mendapatkan Rp. 6.500 sekali kerja. Selain itu, ia pun mendapatkan makan siang, teh, dan makanan ringan. Menurut Mona, upah tersebut lebih rendah dibandingkan buruh tani laki-laki yang mendapatkan Rp. 8.000 ditambah dengan makan siang, kopi, dan juga makanan ringan setiap melakukan *tandur*. Apabila sedang tidak ada kegiatan *tandur* atau panen, ia terpaksa menganggur dan tidak mendapatkan upah. Mona pun ha-nya bisa bersabar menghadapi hal tersebut. Terkadang, ia harus meminjam uang pada orang lain. Jika musim *tandur* atau panen te-lah datang, ia baru bisa membayar pinjaman tersebut.

“...kurang bangetlah buat hidupin keluarga mah.. kalo lagi tandur aku cuma dapet enem setengah sekali tandur, sama snack, teh, sama makan siang..” (Mona, 30 Maret 2013)

“...kalo yang laki-laki kan mungkin diang-gepnnya harus nafkahin keluarga makanya lebih gede.. Ya kalo yang perempuan mah kan dianggepnnya cuma nambah-nambah-in aja, kan dianggepnnya udah ada suami.. udah ada yang mbiayain..” (Mona, 30 Maret 2013)

“...terus pas cerai, ada anak satu, nggak ada yang biayain.. mau terusin tani, capek Dek.. Kurang lagi. Aku nggak mau pinjem-pinjem terus kan ora apa.. malu.. ya aku balik lagi ke Mama..” (Mona, 30 Maret 2013)

Pada kasus ini, terlihat bahwa Mona sudah membanting tulang dari pagi hingga sore untuk membiayai kebutuhan keluarganya (Ibu dan adik-adiknya). Akan tetapi, upah yang ia terima ternyata sangat kurang sehingga ia terpaksa harus meminjam uang kepada tetangganya. Sedangkan, upah yang diterima buruh tani laki-laki ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan upah yang ia terima. Hal tersebut menunjukkan bahwa walaupun pekerjaan tersebut tidak identik dengan pekerjaan perempuan, pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan tetap kurang dihargai dibandingkan dengan yang dilakukan oleh laki-laki. Padahal, buruh tani perempuan dan buruh tani laki-laki melakukan pekerjaan dengan tingkat yang sama. Artinya, posisi perempuan tetap terpinggirkan (marginal) dibandingkan laki-laki karena identitasnya sebagai perempuan.

Menurut De Jardin & Awad, hal tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa perempuan dianggap sebagai pencari nafkah sekunder, sedangkan laki-laki dianggap pencari nafkah utama, yang merupakan salah satu indikasi adanya marginalisasi di bidang pekerjaan. Hal ini menyebabkan laki-laki memiliki prioritas lebih dari perempuan, seperti yang terjadi pada kasus ini, di mana buruh tani laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama sehingga upah yang diterima pun lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pada kasus yang dialami Mona, terlihat bahwa hal tersebut membuatnya berpikir untuk kembali ke dunia prostitusi dan tidak melanjutkan pe-

kerjaannya sebagai buruh tani. Akhirnya, ia pun terpaksa kembali bekerja sebagai pekerja seks komersial.

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan, jelas terlihat bahwa marginalisasi di bidang pekerjaan yang terjadi pada Indri, Ratu, Mona, dan Dita terjadi ketika mereka berhenti menjadi PSK dan memiliki pekerjaan lain. Pada kasus Indri, Ratu, dan Dita, marginalisasi di bidang pekerjaan terlihat dari pekerjaan yang identik dengan perempuan yang kurang dihargai, baik secara sosial maupun ekonomi. Sedangkan, pada kasus Mona, marginalisasi di bidang pekerjaan terlihat dari adanya anggapan bahwa perempuan merupakan pencari nafkah sekunder. Marginalisasi tersebut merupakan salah satu faktor yang cukup mempengaruhi keputusan mereka untuk kembali ke dunia prostitusi.

KESIMPULAN

Subordinasi di bidang pendidikan yang terjadi sudah lama tersosialisasi dapat terlihat dari tidak adanya prioritas bagi anak perempuan dalam keluarga serta adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu bersekolah. Sedangkan, subordinasi di bidang pekerjaan yang terjadi ketika informan berhenti menjadi PSK terlihat dari adanya anggapan bahwa perempuan tidak memiliki kapabilitas di ranah publik dan hanya bisa mengurus pekerjaan di ranah domestik (rumah tangga).

Marginalisasi di bidang pendidikan yang terjadi sebelum informan bekerja sebagai PSK terlihat dari adanya hambatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan karena tidak diberikan kesempatan untuk bersekolah hingga jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan, marginalisasi di bidang pekerjaan yang terjadi ketika informan berhenti menjadi PSK dan memiliki pekerjaan lain dapat terlihat dari

kurang dihargainya pekerjaan yang identik dengan perempuan, baik secara sosial maupun ekonomi, serta adanya anggapan bahwa perempuan merupakan pencari nafkah sekunder.

Beberapa rekomendasi bisa dihasilkan dari penelitian ini, antara lain: 1) perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan bagi perempuan yang dapat dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dengan mengadakan penyuluhan atau seminar atau melalui media-media, seperti poster, spanduk, dan lain sebagainya; 2) Pemberian pelatihan sebagai bekal mereka untuk masuk ke dunia kerja menjadi penting untuk dilakukan sehingga tujuan intervensi dari panti, yakni mantan PSK tidak kembali ke dunia prostitusi, dapat tercapai; dan akhirnya 3) Mengingat penyebab mereka kembali bekerja di dunia prostitusi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, maka masih diperlukan penelitian lanjut dalam issue ini, seperti faktor struktural yang juga mempengaruhi perempuan usia produktif yang terpaksa kembali bekerja sebagai PSK atau kegagalan kebijakan pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi persoalan yang berkaitan dengan maraknya prostitusi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. (2012, April 25). *Nasional, Kesejahteraan Sosial*. Dipetik November 24, 2012, dari Kedaulatan Rakyat Online: <http://krjogja.com/read/126295/psk-rentan-kekerasan.kr>
- Arjani, N. L. (2007). *Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki*. Denpasar: PSW Unud.
- Bemmelen, S. v. (1995). *Jender dan Pembangunan: Apakah yang Baru?* Dalam T. O. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pem-*

- bangunan* (hal. 175-226). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Chant, S. (2007). *Gender, Generation and Poverty: Exploring the Feminisation of Poverty in Africa, Asia, and Latin America*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Cirebon News. (2011, Desember 13). *Sosial Budaya*. Dipetik November 24, 2012, dari Cirebon News (CNC): <http://cirebonnews.com/Sosial-Budaya/PSK-Rentan-Terjangkit-HIV/AIDS.html>
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (A. Fawaid, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Curumur, V. A. (2009). *Pembangunan Kota dan Kondisi Kemiskinan Perempuan*. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Dejardin, A. K., & Awad, A. B. (1995). *Gender, Poverty and Employment: Turning Capabilities into Entitlements*. Geneva: The Development Policies Branch, International Labour Office.
- Febrida, M. (2012, November 13). *Health*. Dipetik November 24, 2012, dari Liputan 6: <http://health.liputan6.com/read/453335/ibu-rt-yang-kena-aids--jumlahnya-lebih-banyak-dari-psk>.
- Heyzer, N. (1986). *Working Women in South-East Asia (Development, Subordination and Emancipation)*. Philadelphia: Open University Press.
- International Labour Organization. (1998). *The Sex Sector: The Economic and Social Bases of Prostitution in Southeast Asia*. (L. L. Lin, Ed.) Geneva: International Labour Office.
- Jajuli, A. (2012, April 30). *Opini*. Dipetik November 29, 2012, dari Radar Lampung: [http://www.radarlampung.co.id/read/opini/48939-peran-perempuan--dalam-pembangunan-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. \(2010\). Bentuk-Bentuk Ketidakeadilan Gender. Dipetik April 5, 2013, dari Aplikasi Data & Informasi PP dan KPA: http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=117](http://www.radarlampung.co.id/read/opini/48939-peran-perempuan--dalam-pembangunan-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. (2010). Bentuk-Bentuk Ketidakeadilan Gender. Dipetik April 5, 2013, dari Aplikasi Data & Informasi PP dan KPA: http://www.menegpp.go.id/aplikasidata/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=52&Itemid=117)
- Moghadam, V. M. (2005). *The Feminization of Poverty and Women's Human Rights*. Paris: Gender Equality and Development Section, Division of Human Rights, UNESCO.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. (2010). *Laporan Data Penduduk Berdasarkan Agama*. Indramayu: Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
- Ridjal, F., Margani, L., & Husein, A. F. (1993). *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.
- Sari, D. I. (2005). Buruh Perempuan: Kemanduaan dan Produktivitas yang Sia-sia. *Jurnal Perempuan*, 5.
- Sensus Penduduk. (2010). *Penduduk Menurut Kelompok Umur, Daerah Perkotaan/Pedesaan, Jenis Kelamin*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Setianingsih, Y. (2011, April 1). *Read*. Dipetik Desember 7, 2012, dari Inilah. com: <http://www.inilah.com/read/detail/>

1379512/80-psk-kembali-jajakan-diri-
setelah-dibina

- Supriadi, A. (2008, September 24). *Berita*. Dipetik November 29, 2012, dari Kabar Indonesia: <http://www.kabarindonesia.com/berita/print.php?id=20080924181005>
- Survei Angkatan Kerja Nasional. (2010). *Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional. (2009-2010). *Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas yang Tidak/Belum Pernah Sekolah menurut Provinsi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2009-2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional. (2010). *Persentase Penduduk Berumur 10 tahun Ke atas yang Buta Huruf menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2009-2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Soedjono. (1977). *Masalah Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: Karya Nusantara.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tangdilintin, P. (2007). *Masalah-Masalah Sosial*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Sigi SCTV. (2010, Maret 3). News. Dipetik Mei 25, 2013, dari Liputan 6 : <http://news.liputan6.com/read/266308/prostitusi-rumahan-ala-pantura>
- Yin, R. K. (1989). *Case Study Research: Design and Methods. Applied Social Research Methods Series*. Washington DC: Sage Publications.